

**PENGELOLAAN GUGUS SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU
(Studi Kasus Pada (3) Gugus SD di Kecamatan Keritang)**

ABSTRAK

Sekolah Dasar sebagai satuan pendidikan formal yang pertama pada jenjang pendidikan Dasar sangatlah penting bagi usaha awal pembinaan dan pengembangan SDM. Selaras dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat.

Jelas di sini bahwa Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan yang menanamkan *Basic Fundamental* bagi peserta didik, terutama dalam koridor pengembangan budaya belajar, budaya bekerja dan budaya membangun. Untuk mewujudkan visi tersebut diawali dengan peningkatan kualitas kemampuan guru yang dilaksanakan melalui Pembinaan Sistem Gugus Sekolah Dasar.

Pembinaan Sistem Gugus Sekolah Dasar merupakan satu bentuk sistem on-service training dengan pola utama dialogis yang dipandu oleh mitra kerja dari satuan pendidikan yang lebih tinggi atau guru SD senior, termasuk para guru yang memiliki latar belakang pendidikan melebihi standar guru SD.

Dalam praktek operasional pada 3 (tiga) Gugus Sekolah yang diamati melalui kegiatan prasurvey ditemui berbagai fenomena yang diduga menghambat pelaksanaan Pembinaan Sistem Gugus SD secara efektif dan efisien. Fenomena tersebut antara lain: (1) perencanaan Gugus SD belum berdasarkan kepentingan SD secara keseluruhan dalam Gugus, (2) belum menerapkan prinsip dialogis, (3) penunjukan Pengurus Kelompok Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru belum didasarkan pada tingkat kemampuan dan relevansi pendidikan. (4) Selalu terjadi "over leaving" antara tugas-tugas anggota pengurus, (5) banyak kebijakan yang berubah dan tidak konstan, (6) Banyak di antara guru setempat yang enggan mengikuti pertemuan KKG, (7) sistem pengawasan yang dilakukan selama ini belum berjalan optimal, masih adanya status quo yang mencari kesalahan, bukan perbaikan. Berangkat dari gejala tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat permukaan, terutama mencari akar permasalahan serta memberikan solusi praktis berdasarkan kerangka teoritis yang relevan.

Permasalahan yang dirumuskan tersebut yakni: ***Bagaimana efektivitas Pengelolaan Gugus Sekolah Dasar yang dilakukan di lingkungan Kandep Dikbud Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau?***

Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang membanding berbagai teori manajemen

antara lain: (1) Konsep Manajemen, (2) Ruang Lingkup Manajemen, (3) Kriteria Manajemen yang Efektif, (4) Urgensi TQM dalam Gugus SD, serta (5) Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gugus Sekolah Dasar dari Ditjen Dikmenum, Kakanwil Depdikbud Propinsi Riau, serta dari Kandep Dikbud setempat, diperoleh kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini meliputi:

Secara umum Pengelolaan Gugus Sekolah Dasar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dikategorikan belum efektif, baik dalam implementasi penyelenggaraan KKPS, KKKS, KKG, maupun PKG. Namun dari 3 (tiga) Gugus Sekolah yang diteliti (Gugus SD 005 Kota Baru, Gugus SD 010 Selensen dan Gugus SD 032 Pebenaan) yang diklasifikasikan dalam Gugus Kota, IDT dan Terpencil/Sulit, terdapat Forum kegiatan yang dinilai cukup baik. Seperti halnya pelaksanaan program pada forum KKPS bagi Gugus SD 005 Kota Baru yang dinilai menggembirakan untuk dijadikan pilot bagi Gugus SD sekitarnya.

Melihat volume kelemahan yang mewarnai praktek Pengelolaan Gugus SD dapat menghambat pelaksanaan Gugus SD setempat dengan muatan harapan peningkatan kualitas kemampuan profesional guru, maka perlu agenda rekomendasi antara lain: (1) Frekwensi kunjungan Pengawas ditingkatkan, minimal sesuai dengan kalender yang ditentukan. (2) Manajemen setiap forum hendaknya mengacu kepada konsep TQM (total kualiti manajemen) yang memperhatikan aspek kebersamaan dengan upaya melakukan perbaikan terus menerus disetiap aspek dan lini kerja. Dituntut komitmen pengurus sebagai tim leader memprioritaskan inovasi sebab di depan tugas dan permasalahan kependidikan sangat berat, apalagi menghadapi implementasi Riau sebagai Negara Federal atau otonomi yang seluas-luasnya. (3) Kekuasaan yang lebih luas perlu diberikan kepada guru dalam membenahi manajemen KKG, terutama bersama Kepala SD menetapkan SD Inti sesuai dengan keinginan bersama dan bukan penetapan dari atasan yang mengandung adanya tendensi kolusi dan nefotisme. (4) Diciptakan hubungan yang baik dengan lembaga dan perusahaan setempat, guna membantu penyelenggaraan kegiatan gugus dan memberikan pengertian bahwa tugas-tugas kependidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua, serta (5) Upaya menegakkan disiplin yang monoton perlu dikurangi dengan memperhatikan aspek psikologis manusiawi lainnya, sehingga keengganan guru mengikuti forum dapat diatasi melalui kesadaran akan tugas bersama.